

# Kebijakan Satu Peta dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dengan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis *Tri Hita Karana*

**Ni Ketut Sari Adnyani<sup>1</sup>, Ni Made Wiratini<sup>2</sup>, Kadek Dedy Suryana<sup>3</sup>, Komang Putri Dinda Ayu Tina Toon<sup>4</sup>, Putu Virgi Pradnya Widiasri<sup>5</sup>**

<sup>1,4</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

<sup>2,5</sup>Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

<sup>3</sup>Jurusan Hukum, Universitas Hahendradatta, Denpasar, Indonesia

\* Ni Ketut Sari Adnyani / [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id)

## ABSTRAK

Urgensi penelitian sebagai tindak lanjut terhadap degradasi sumber daya (SDA) pesisir Tiongkok yang merupakan jalur migrasi biota laut dan perikanan bernilai ekonomis tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk kearifan lokal *Tri Hita Karana* mendukung *One Map Policy Blue Economy* berkelanjutan berorientasi pada lima arah kebijakan ekonomi biru ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jenis penelitian lapangan. Informan, responden ditentukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen, observasi, wawancara, angket/kuisisioner. Analisis SWOT melalui tahapan FGD, Uji Ahli dan Uji Publik formulasi kebijakan dan finalisasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi konsep kebijakan *One Map Policy Blue Economy* Berkelanjutan dengan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis *Tri Hita Karana* mengintegrasikan data dan informasi terumbu karang untuk perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan, mulai dari pemantauan kerusakan hingga pengembangan ekonomi biru.

**Kata Kunci:** *Blue economy*, Nonkonfrontatif, *One map policy*, Sumber daya pesisir, *Tri hita karana*.

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan belum dikelolanya SDA pesisir Tiongkok secara optimal, menunjukkan kesenjangan penerapan Undang-Undang (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014). Bahkan telah terjadi kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kelangsungan ekosistem akibat pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (Jazuli, 2015: 181). Terjadinya degradasi disebabkan tingkat ekstraksi berlebihan dan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan, telah menimbulkan ancaman kerugian ekologi. Permasalahan degradasi menjadi perhatian serius, karena wilayah pesisir Tiongkok bukan hanya merupakan sumber pangan dan pertanian, tetapi merupakan pula lokasi bermacam SDA, seperti ekowisata dengan pemandangan alam indah, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan termasuk sebagai jalur pelayaran (Subagyo, Wijayanti & Zakiyah, 2017: 177). Degradasi, mencakup berbagai bentuk, diantaranya: pencemaran, abrasi pantai, over-exploitation SDA dan perubahan fungsi lahan, berdampak pada ekosistem dan kehidupan pesisir (Subair, 2024: 45).

Urgensi kebijakan *One Map Policy* (selanjutnya disebut dengan istilah OMP) dalam pengelolaan kawasan pesisir sangat penting untuk mengatasi tumpang tindih lahan, mempercepat pembangunan, melindungi ekosistem pesisir, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan data spasial yang terintegrasi dan terstandar, sehingga memungkinkan perencanaan yang lebih akurat dan berkelanjutan di wilayah pesisir yang dinamis (Manullang dkk, 2022: 83).

Orientasi sasaran Kebijakan OMP dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah penyediaan satu peta referensi yang terintegrasi, akurat, dan terstandar untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya pesisir, mendukung pembangunan infrastruktur maritim, serta melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan (Harahap, 2015: 7). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi informasi geospasial yang mendukung perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah pesisir secara efektif dan berkelanjutan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang kebijakan OMP merupakan kebijakan yang diintegrasikan dalam bidang kemaritiman untuk menyelaraskan informasi geospasial tematik (IGT) agar menjadi satu peta tunggal yang terintegrasi (Pakpahan dkk, 2019: 109), tujuannya menyatukan data antar sektor dan meminimalkan tumpang tindih data spasial yang selama ini menghambat perencanaan dan pembangunan ruang, termasuk di kawasan pesisir. Kebijakan ini didukung oleh Peraturan Presiden dan berupaya menciptakan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan, penyelesaian konflik lahan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan di kawasan pesisir Tiongkok.

Target pencapaian OMP dalam pengelolaan kawasan pesisir mencakup penyediaan data geospasial yang akurat dan terintegrasi, mengurangi konflik lahan (Pandjaitan, 2024: 329), meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pembangunan berkelanjutan, dan mempercepat penanganan isu kemaritiman di kawasan pesisir Tionyar. Tujuannya adalah menciptakan satu referensi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan, perencanaan, dan investasi yang terintegrasi dalam pengelolaan pesisir secara di Desa Tionyar.

Penelitian ini terletak pada pemetaan kebijakan terintegrasi dengan mengakomodasi akses informasi publik melalui pendekatan nonkonfrontatif. Dengan rancangan *one map policy blue economy* berkelanjutan, dimana *stakeholder* terkait dapat menerapkan konservasi berkala melalui program kerja terjadwalkan efektif memperkuat nilai-nilai harmonisasi melalui kemitraan berkelanjutan. Penelitian ini menggabungkan konsep *Tri Hita Karana*, mencakup unsur *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* mendorong harmonisasi antara kebijakan konservasi dengan kegiatan ekonomi berkelanjutan (Adnyani, 2014: 301).

### 3. METODE

Metode penelitian OMP dalam pengelolaan kawasan pesisir dapat menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman dari integrasi peta yang ada, sehingga dapat merumuskan strategi pengembangan kebijakan yang efektif. Metode penelitian lainnya yang relevan mencakup pemetaan partisipatif untuk melibatkan masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayah pesisir, serta analisis data spasial yang mendukung penetapan standar dan basis data geospasial tunggal.

Penelitian ini difokuskan pada kegiatan pengembangan produk kebijakan. Pelaksanaan penelitian melibatkan mahasiswa sebagai asisten riset, bertugas dalam mengasistensi proses analisis kebutuhan, pengembangan perangkat pendukung penelitian, serta proses pengumpulan dan analisis data. Informan ditentukan secara *purposive*. Teknik yang digunakan dalam penentuan responden juga dengan teknik *non probably sampling* yaitu *purposive sampling*, jumlah anggota populasi dipilih secara sengaja berdasarkan tujuan sebuah penelitian dengan pertimbangan memiliki keterkaitan dan keterlibatan langsung dengan kawasan penelitian (Anggito & Setiawan, 2018: 87). Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 56 responden, terdiri dari unsur masyarakat yang berdekatan langsung dengan SDA pesisir Tionyar. Responden masyarakat adalah unsur masyarakat kategori kelompok usia produktif (15-64 tahun) dengan berbagai latar belakang dan profesi baik pedagang, nelayan, wiraswasta, hingga tokoh masyarakat yang menetap dan mengetahui keadaan dan kondisi SDA pesisir di daerah tersebut serta memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan SDA pesisir Tionyar.

### 4. TEMUAN DAN DISKUSI

#### 4.1 TEMUAN

Temuan umum mengenai degradasi terumbu karang di kawasan pesisir meliputi kerusakan fisik akibat aktivitas manusia seperti pembangunan pesisir dan penangkapan ikan yang merusak. Selain itu, juga ditemukan dampak dari pencemaran laut dari limbah dan peningkatan sedimentasi akibat erosi, serta isu pemanasan global seperti pemutihan karang. Kondisi ini berdampak pada penurunan jumlah ikan dan kepuasan wisatawan, yang berujung pada kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Penyebab utama degradasi terumbu karang di kawasan pesisir adalah aktivitas manusia seperti polusi (limbah domestik, industri, dan pertanian), penangkapan ikan berlebihan dan merusak (menggunakan bom atau racun), penambangan karang, serta kerusakan fisik akibat jangkar kapal dan kegiatan wisata. Selain itu, pemanasan global yang menyebabkan peningkatan suhu air laut dan perubahan iklim juga berkontribusi pada pemutihan dan kematian karang.

Dampak degradasi terumbu karang di kawasan pesisir sangat luas (Triwibowo, 2023: 61), mencakup hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat ikan, penurunan hasil tangkapan nelayan dan pendapatan masyarakat, berkurangnya perlindungan alami terhadap garis pantai sehingga meningkatkan risiko erosi dan banjir, serta kerugian ekonomi akibat menurunnya sektor pariwisata bahari. Terumbu karang yang sehat juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, sehingga kerusakannya dapat mengganggu rantai makanan dan mengurangi produksi oksigen di laut.

Berbagai pihak merespons degradasi terumbu karang melalui upaya konservasi seperti pembangunan zona perlindungan laut, penegakan regulasi, serta kegiatan restorasi seperti transplantasi karang dan pembangunan terumbu buatan. Respons ini didorong oleh kesadaran akan dampak sosial-ekonomi, seperti penurunan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan, serta dampak ekologis seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya perlindungan garis Pantai.

## 4.2 Diskusi

### 4.2.1 Formulasi kebijakan *One Map Policy Blue Economy* Berkelanjutan dengan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis *Tri Hita Karana*

Sasaran kebijakan adalah desa Tianyar sebagai desa yang memiliki potensi terumbu karang. Permasalahan penurunan kualitas terumbu karang di perairan Tianyar urgensi untuk ditangani pengelolaannya akibat terjadi degradasi karena aktifitas eksploitasi yang mengabaikan prinsip etika, nilai moral dan kebudayaan nenek moyang sebagai negara bahari. Bahkan sinergisitas *pentahelix* dalam pengelolaan konservasi terumbu karang hanya sebatas dilakukan oleh ±1/5 dari jumlah masyarakat Tianyar. Rekomendasi formulasi kebijakan yang mengarah pada konservasi terumbu karang merupakan kajian kebijakan kemaritiman dalam pembangunan dan penguatan kebudayaan yang berorientasi pada kearifan lokal. Melihat pentingnya pengelolaan SDA pesisir Tianyar, maka untuk memanfaatkannya secara optimal dan bertanggung jawab, memerlukan pengawasan dan pengendalian, sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan (Holle dkk, 2022: 37). Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum dalam pengelolaan SDA pesisir Tianyar mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif berbasis *Tri Hita Karana* mendukung *One Map Policy Blue Economy* berkelanjutan.

Pendekatan nonkonfrontatif dimaksudkan bahwa pengelolaan SDA pesisir Tianyar sebagai sistem penyanga kehidupan dengan mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola SDA yang efektif, membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan pelestarian. *Tri Hita Karana* merupakan konsep ajaran Hindu yang mengajarkan manusia untuk hidup harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Konsep ini diyakini dapat membawa kebahagiaan, kerukunan, keharmonisan dalam kehidupan, mendukung *One Map Policy Blue Economy* berkelanjutan berorientasi pada lima arah kebijakan ekonomi biru yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), meliputi memperluas Kawasan konservasi laut; menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budidaya laut, pesisir dan daratan berkelanjutan; pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta kebijakan untuk pengelolaan sampah plastik di laut (KKP, 2024: 3). *One Map Policy* dalam bidang kemaritiman diformat untuk menciptakan satu peta referensi yang terintegrasi dan akurat untuk SDA pesisir Tianyar, bertujuan mengurangi tumpang tindih data spasial dan mempercepat pembangunan sehingga upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui hilirisasi.

*One Map Policy* mengintegrasikan peta-peta tematik, termasuk data terumbu karang, untuk menciptakan satu referensi geospasial yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Dalam pengelolaan terumbu karang, *One Map Policy* memungkinkan perencanaan tata ruang yang lebih baik, percepatan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan, serta mitigasi dan pencegahan kerusakan lingkungan. Formulasi kebijakan ini selaras dengan kebijakan satu peta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merupakan peta nasional terumbu karang, didukung oleh program seperti *COREMAP* (program ini merupakan prakarsa pemerintah Indonesia untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan terumbu karang secara lestari, yang kemudian akan terintegrasi dalam sistem data KSP) dan kolaborasi lintas sektor untuk pengelolaan ekosistem laut yang lestari. **Kebaruan utama penelitian ini** terletak pada pemetaan kebijakan terintegrasi dengan mengakomodasi akses informasi publik melalui pendekatan nonkonfrontatif. Dengan rancangan *one map policy blue economy* berkelanjutan, dimana *stakeholder* terkait dapat menerapkan konservasi berkala melalui program kerja terjadwalkan efektif memperkuat nilai-nilai harmonisasi melalui kemitraan berkelanjutan. Penelitian ini menggabungkan konsep *Tri Hita Karana*, mencakup unsur *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* mendorong harmonisasi antara kebijakan konservasi dengan kegiatan ekonomi berkelanjutan.

### 4.2.2 Uji Formulasi Kebijakan

Uji formulasi kebijakan OMP untuk pengelolaan terumbu karang (Hukom, Yulianda & Kamal, 2019: 93), akan melibatkan penyusunan dan pengujian peta tematik terumbu karang dalam kerangka kebijakan satu peta pesisir Tianyar dituangkan dalam OMP, yang menekankan integrasi data geospasial tematik menjadi satu basis data yang konsisten. Uji formulasi kebijakan OMP ini bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih informasi peta yang ada, menyelaraskan perencanaan pengelolaan dengan data geospasial, dan meminimalkan konflik serta potensi kerusakan lingkungan. Uji coba ini dapat meliputi validasi data spasial, harmonisasi standar, dan pengembangan geoportal tematik terumbu karang sebagai *platform* informasi dan data untuk pengambilan Keputusan.

Relevansi pendekatan Nonkonfrontatif dengan muatan nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* terhadap pengujian formulasi kebijakan OMP dalam pengelolaan SDA pesisir Tianyar, yaitu sebagai berikut:

1. Melalui pendekatan Nonkonfrontatif dengan melibatkan mitra peneliti YYBS, Yayasan Widya Sari, Pemerintah Desa Tianyar, Desa Adat dan Masyarakat Tianyar, dipastikan bahwa OMP informasi

- geospasial tentang terumbu karang tidak tumpang tindih antar lembaga, menciptakan satu data yang akurat dan terpadu dengan muatan nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana*.
2. Sinkronisasi Perencanaan dapat tercipta dengan pendekatan Nonkonfrontatif dan melalui implementasi nilai *Tri Hita Karana*, keselarasan perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan OMP basis data geospasial dapat konsisten.
  3. Sinergi unsur *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* dalam muatan materi nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* dijadikan parameter dalam mencegah kerusakan lingkungan. Pendekatan Nonkonfrontatif juga dibutuhkan dalam mengurangi potensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ketidakstabilan data dan informasi OMP yang dapat menghambat perencanaan pembangunan yang efektif. Pada dasarnya formulasi kebijakan *One Map Policy Blue Economy* berkelanjutan dengan pendekatan Nonkonfrontatif berbasis *Tri Hita Karana* mendukung pengelolaan berkelanjutan, menyediakan dasar data yang kuat untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang yang lebih baik dan berkelanjutan.

#### **4.2.3 Implementasi *One Map Policy Blue Economy* berkelanjutan dengan pendekatan Nonkonfrontatif berbasis *Tri Hita Karana***

Implementasi formulasi kebijakan OMP dalam pengelolaan terumbu karang meliputi pengumpulan data geospasial terumbu karang, pengembangan *platform* untuk pemantauan dan visualisasi, pengujian dan penyempurnaan platform, koordinasi *stakeholder*, penetapan rencana pengelolaan, dan pemantauan serta evaluasi melalui pengembangan WebGIS atau sistem informasi geografis lainnya yang terintegrasi.

Implentasi *One Map Policy Blue Economy* berkelanjutan dengan pendekatan Nonkonfrontatif berbasis *Tri Hita Karana* mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi biru (Adnyani dkk, 2025: 221); dan **misi Asta Cita 8:** Memperkuat penyebarluasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penelitian ini sebagai strategi pengembangan formulasi kebijakan pengelolaan kawasan pesisir dengan kajian multifaset sebagai sumber belajar bagi mahasiswa. Mahasiswa dalam konteks ini dapat memahami kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) yang ada, serta urutan prioritas pengembangan formulasi kebijakan (Husni dkk, 2020: 395).

Kebijakan *One Map Policy Blue Economy* berkelanjutan dengan pendekatan Nonkonfrontatif berbasis *Tri Hita Karana* untuk terumbu karang bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola yang terpadu dan efisien, menyediakan data spasial yang akurat dan terbuka untuk pemantauan jangka panjang, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mendukung upaya konservasi dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang.

### **5. KESIMPULAN**

Perlindungan wilayah pesisir dari kegiatan eksploitasi tidak bertanggung jawab, diagendakan terintegrasi dalam kegiatan pemanfaatan, reklamasi, konservasi, rehabilitasi dan mitigasi bencana. Selain itu, pendekatan nonkonfrontatif bertujuan menciptakan keharmonisan dalam pengelolaan SDA pesisir, perlu penyediaan ruang publik bagi masyarakat khususnya masyarakat desa adat untuk turut serta berpartisipasi dan mengembangkan inisiatif pemberdayaan. *One map policy blue economy* berkelanjutan dirancang tidak hanya menitikberatkan dan memperhatikan lingkungan saja, namun aspek ekonomi, kepastian hukum, perlindungan terhadap kearifan budaya lokal. Kearifan *Tri Hita Karana* diusulkan untuk membangun moral hukum dan nilai-nilai etika dalam kehidupan diselenggarakan dengan atas tanggung jawab, atas keberlanjutan dalam pengelolaan terumbu karang di pesisir Tionyar.

### **6. ACKNOWLEDGEMENT**

Terima kasih kepada Kemendiktianteck atas hibah DPPM penelitian dengan skema Penelitian Fundamental Reguler Tahun Anggaran 2025 dengan Kontrak Penelitian, Kontrak Induk: 100/C3/DT.05.00/PL/2025, tanggal 28 Mei 2025 dan Kontrak Turunan: 322/UN48.16/PT/2025, tanggal 30 Mei 2025 dengan judul "Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Tionyar Mengedepankan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis *Tri Hita Karana* Mendukung *One Map Policy Blue Economy* Berkelanjutan". Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra penelitian Yayasan Yowana Bhakti Segara, dan *stakeholders* lainnya, seperti Yayasan Widya Sari, Pemerintah Desa Tionyar, Desa Adat dan Masyarakat Tionyar. Terima kasih disampaikan pula kepada LPPM Undiksha karena telah memfasilitasi media publikasi luaran hasil penelitian telah terwadahi melalui forum Senari Tahun 2025.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2014). Nyepi Segara sebagai kearifan lokal masyarakat Nusa Penida dalam pelestarian lingkungan laut. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1).
- Adnyani, N. K. S., Wiratini, N. M., Pradnya, P. V., Toon, K. P. D. A. T., & Suryana, K. D. (2025). Non-Confrontational Approach Based on Tri Hita Karana Supporting the One Map Policy for a Sustainable Blue Economy. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 221, p. 02015). EDP Sciences.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harahap, R. H. (2015). Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan. In *Forum Rektor Indonesia dan USU* (pp. 1-22).
- Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 24-37.
- Hukom, F. D., Yulianda, F. D., & Kamal, B. M. (2019). Efektivitas zonasi dalam pengelolaan perikanan karang di kawasan konservasi perairan Selat Dampier, Raja Ampat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(2), 93-103.
- Husni, S., Yusuf, M., Nursan, M., FR, A. F. U., & Widiyanti, N. M. Z. (2022). Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Dusun Ujung Desa Pemongkong Kebupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(4), 395-406.
- Indonesia, Pemerintah Pusat, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 15 Januari 2014, LN.2014/No.2, TLN No.5490, LL SETNEG: 25 HLM.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197.
- Manullang, S. O. M., Kusumadewi, Y. K., Tompul, V. B. T., & Nurwandy, I. I. N. (2022). Urgensi Single Basic Map Untuk Perlindungan Sumber Daya Air Dalam Penataan Ruang. *Jurnal Presumption of Law*, 4(1).
- Pakpahan, F., Ramadani, T., Pradana, S. A., Supriyanto, M. A., & Mardiyono, E. (2019). Implementasi kebijakan satu peta energi sumber daya mineral (esdm one map) di kementerian energi sumber daya mineral republik Indonesia. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 109-118.
- Pandjaitan, M. L. W. (2024). Optimalisasi Kebijakan One Map Policy dengan Aplikasi SI PANDUBEDAS: Integrasi Data Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. *Jurnal Praktik Keinsinyuran*, 1(03), 328-339.
- Perikanan, S. P. K., Kementerian Kelautan dan Perikanan; (2024), April.
- Subagyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press.
- Subair, L. (2024). Eksistensi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir di Luwu Utara (Perspektif Hukum Lingkungan). *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 45-58.
- Triwibowo, A. (2023). Strategi pengelolaan ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 61-66.